# **PENGORGANISASIAN PEMAKAMAN DAN SKEMA**

# **KESEJAHTERAAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN:**

# **STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA**

# **Subhan Purno Aji**

# Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

# subhanpa@gmail.com

**ABSTRAK**

# Tulisan ini melihat organisasi pemakaman sebagai proksi kesejahteraan (pengaturan pemerintahan pasar-negara-masyarakat) dalam konteks masyarakat yang telah mengalami rasionalisasi, sekularisasi, pengobatan dan hilangnya "rasa" sebagai sebuah komunitas. Tulisan ini dibatasi pada penyelenggara pemakaman di komunitas Muslim di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta. Tulisan ini menemukan bahwa ada variasi dalam organisasi pemakaman di masyarakat perkotaan oleh lembaga yang berbeda, yaitu oleh lembaga komersial, negara dan komunitas agama. Variasi tersebut menggambarkan variasi skema kesejahteraan dalam layanan fana dan / atau organisasi pemakaman di masyarakat perkotaan.

Kata kunci: Organisasi Pemakaman, skema kesejahteraan, lembaga komersial, negara, komunitas agama

***ABSTRACT***

# *This paper treats the funeral organization as a welfare proxy (governance arrangement of market-state-society) in the context of society that has undergone rationalization, secularization, medicalization and loss of "sense" as a community. This paper limits itself to funeral organizers in Muslim communities in Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta Province. This paper finds that there is variation in the organization of funerals in urban communities by different institutions, ie by commercial institutions, state and religious communities. The variation illustrates the variation of welfare schemes in mortal services and/or funeral organization in urban communities.*

# Keywords **:** *Funeral organization, welfare schemes, commercial institutions, state, religious communities*

# **Latar Belakang**

Tulisan ini mengaitkan pengorganisasian pemakaman sebagai proksi kesejahteraan (pengaturan tata kelola pasar-negara-masyarakat) dalam konteks masyarakat yang telah mengalami proses rasionalisasi, sekulerisasi, medikalisasi dan hilangnya “rasa” sebagai komunitas. Tulisan ini membatasi diri dalam pengorganisasi pelayanan jenazah dalam masyarakat muslim di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengorganisasian pemakaman sebagai salah satu proksi kesejahteraan di dalam masyarakat perkotaan seringkali atau bahkan selalu diabaikan dalam studi tentang kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hal itu dapat dilatar belakangi oleh wacana kesejahteraan yang dianggap tidak terkait sama sekali dengan isu seputar kematian. Memang selama ini, isu kesejahteraan hampir selalu dikaitkan dengan siklus kehidupan manusia, kelahiran-kehidupan-kematian, tetapi hanya berhenti pada dua yang pertama, sementara abai pada yang terakhir. Padahal kematian sebagai sebuah proses sangat berkaitan erat dengan konstruksi sosial-budaya masyarakat setempat. Sejauh mana keluarga dan komunitas dalam memberikan pelayanan kepada si jenazah mau tidak mau mengaitkannya dengan efek sosial-ekonomi. Dari pintu masuk ini dapat dengan mudah mengaitkan kematian dengan isu kesejahteraan.

Di lain pihak, dalam masyarakat Jawa pelayanan jenazah merupakan kewajiban komunal.[[1]](#footnote-0) Hal ini menambah peminggiran kematian terlepas dari isu seputar kesejahteraan. Persoalan-persoalan yang menyangkut bagaimana bentuk pengurusan jenazah dan akibat sosial-ekonomi bagi keluarganya cenderung tidak dihiraukan. Seolah-olah bahwa pengorganisasian pemakaman telah "*taken for granted*". Jka ada individu yang meninggal dunia, maka sudah ”otomatis” ada yang mengurusnya entah keluarga, komunitas atau unit terkecil dari negara: pengurus RT, RW dan dusun. Dengan munculnya masyarakat yang semakin terdiferensiasi dan terindividualisasi hal tersebut tidak lagi relevan, misalnya di masyarakat perkotaan. Di sana, seperti yang terjadi dalam masyarakat Barat, kematian telah mengalami individualisasi, rasionalisasi, sekulerisasi, dan medikalisasi.[[2]](#footnote-1) Dengan begitu, “rasa” sebagai sebuah komunitas mulai pudar.

Istilah pengorganisasian pemakaman merujuk pada pengurusan pemakaman dan segala yang menyertainya oleh mereka yang masih hidup, baik oleh keluarga, komunitas maupun oleh institusi lain. Kematian sebagai siklus hidup mengakibatkan prosesinya tidak hanya berhenti pada pemakaman (*funeral*), tetapi masih berangkaian dengan kegiatan lain pasca-pemakaman. Oleh karenanya, pengorganisasian ini mencakup proses pengurusan jenazah, dimuali dari peristiwa kematian si jenazah sampai dengan proses pasca-pemakaman. Adapun kesejahteraan pemakaman (*funeral welfare*) merujuk pada aspek-aspek sosial-ekonomi yang melibatkan pengaturan relasi pasar-negara-masyarakat dalam pelayanan jenazah dan/atau pengorganisasian pemakaman.

# **METODOLOGI PENELITIAN**

Argumen tulisan ini didapatkan dari studi dokumen dan pengamatan terhadap pengorganisasian pemakaman di Kota Yogyakarta selama periode November-Desember 2015. Dokumen diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta tahun 2014, laporan akademik, pencarian data yang berkaitan dengan obyek studi di internet. Metode yang digunakan adalah studi kasus, untuk melihat unit analisis yang spesifik, unik dan terbatas pada setting waktu dan tempat tertentu. Kota Yogyakarta dipilih tidak hanya karena memiliki budaya Jawa yang masih kental, tetapi juga, yang lebih penting, di kota ini sedang terjadi urbanisasi yang pesat.

# **PERSPEKTIF TEORITIS: PENGORGANISASIAN PEMAKAMAN DAN ISU KESEJAHTERAAN**

Pengamatan Clifford Geertz tentang fenomena kematian dalam masyarakat Jawa justru melahirkan apa yang ia sebut sebagai “inti agama jawa”, yaitu *slametan*.[[3]](#footnote-2) Alih-alih kematian dipahami sebagai “episode terakhir” dalam kehidupan manusia, tetapi bagi masyarakat Jawa hal itu lebih dipahami sebagai siklus kehidupan, *rite of passage*. Kematian dipahami sebagai peralihan dari alam dunia menuju alam kubur. Upacara kematian di Jawa jauh dari riuh dan cenderung tidak dilakukan secara terlalu demonstratif. Para tetangga dan sanak-famili memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan dengen menekankan pada kepasrahan kepada Yang Kuasa. Di dalam *slametan* inilah salah satu yang membentuk solidaritas komunal masyarakat Jawa, sebagaimana pendapat Geertz(Geertz 1957, 40)(Geertz 1957, 40):

“*For the mourner, the funeral and postfuneral ritual is said to produce a feeling of iklas, a kind of willed affetlessness, a detachted and static of “not caring”; for the neighborhood group is said to produce rukun, “communal harmony.”[[4]](#footnote-3)*

Inilah yang membentuk solidaritas di pedesaan Jawa. Tradisi Jawa dan ajaran Islam dalam peristiwa kematian nyaris tanpa masalah. Pranata kematian yang diikat oleh solidaritas komunal masih sangat mencolok, sehingga keluarga yang ditinggalkan juga tidak direpotkan dengan prosesi pengurusan jenazah. *Modin* (orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin upacara-upacara kematian) masih mudah untuk ditemukan. Lahan pemakaman juga tidak jadi soal, karena masih tersedianya lahan untuk pemakaman.

Tetapi menurut pengamatan Saiful Hakam di Yogyakarta mengkonfirmasi terjadinya perubahan sosial dan pergeseran makna kematian dalam masyarakat muslim perkotaan di Yogyakarta.[[5]](#footnote-4) Yang mencolok adalah adanya komersialisasi pengorganisasian pemakaman. Hal itu terlihat dari munculnya Yayasan Bunga Selasih (YBS). Yayasan ini menawarkan perawatan jenazah muslim secara profesional dengan tarif dan paket tertentu.

Apa yang terjadi di Yogyakarta nampaknya juga ditemukan di dalam masyarakat yang telah mengalami industrialisasi dan urbanisasi. Tony Walter mengamati bahwa di dalam masyarakat barat yang telah mengalami industrialisasi, praktek pelayanan pemakaman bervariasi.[[6]](#footnote-5) Di Amerika, pada umumnya mekanisme pasar lebih mendominasi. Bahkan di negara tersebut pemakaman telah menjadi bisnis. Sejak dekade 1970-an hampir semua rumah duka (*funeral home*) adalah milik individu dan korporasi sehingga negara dan asosiasi tidak ikut campur pada bidang ini. Sedangkan di negara-negara Eropa daratan (Perancis, Spanyol, Jerman), pemakaman lebih banyak difasilitasi oleh otoritas lokal (*municipal*). Di negara dimana pemakaman dilakukan oleh otoritas lokal, segera setelah terjadinya kematian keluarga akan melaporakan kepada pihak otoritas lokal untuk mendapatkan sertifikat kematian (*death certificate*/*acte de décès*), yang dengannya jenazah mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Adapun di negara-negar Skandinavia, Swedia misalnya, peran geraja sangat besar dalam pelayanan jenazah. Bahkan, mereka sampai menyediakan tanah pemakaman secara gratis. Secara umum, meskipun di negara Skandinavia dapat disebut negara sekuler, tetapi untuk urusan kematian geraja masih memiliki otoritas yang besar.[[7]](#footnote-6)

Seiring dengan tumbuhnya kota-kota besar di Jawa, permasalahan pelayanan jenazah mulai bermunculan. Masyarakat Jawa perkotaan seringkali gagap ketika ada anggota keluarga mereka meninggal. Manuel Castell menjelaskan bahwa perubahan perkotaan sebagai basis produksi niscaya menjadi arena akumulasi kapital. Didalamnya niscaya terdapat proses “konsumsi kolektif” bersifat komunal meluas menjadi konsumsi yang disediakan oleh pasar (*ownership*) atau konsumsi yang disediakan oleh negara (kolektifis).[[8]](#footnote-7) Meluasnya model konsumsi yang yang disediakan oleh pasar membuat barang-barang publik terprivatisasi.

Maka dalam konteks masyarakat kapitalis, terjadi perubahan yang signifikan dalam hal pengorganisasian pemakaman. Christine Valentine dan Kate Woodthrope mengintroduksi istilah kesejahteraan pemakaman (*funeral welfare*), untuk menegaskan bahwa pemakaman terkait dengan konsep penghasilan, budaya, politik dan tipe rezim kesejahteraan yang berlaku di negara-negara Eropa Barat.[[9]](#footnote-8) Mereka menemukan bahwa ada tipe kesejahteraan pemakaman, tipe korporatis, tipe liberal dan tipe sosial demokrasi.

Tabel. Tipe Kesejahteraan Pemakaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tipe | Karakteristik | Negara |
| 1. | Liberal | Penyedia jasa institusi komersil, ditanggung oleh individu, sedikit campur tangan negara/otoritas lokal | Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada |
| 2. | Korporatis/Konservatif | Peran komunitas cukup besar, otoritas lokal/negara memberikan sedikit subsidi | Belgia, Perancis, Jerman, Spanyol |
| 3. | Sosial Demokrasi | Penyediaan dana kematian dari subsidi negara | Denmark, Belanda, Norwaigia, Swedia |

Sumber: Diolah dari Christine Valentine and Kate Woodthorpe, “From the Cradle to the Grave: Funeral Welfare from an International Perspective”, *Social Policy and Administration* 48 no. 5 (2014), 529-530.

# **VARIASI DAN SKEMA KESEJAHTERAAN PELAYANAN JENAZAH DI KOTA YOGYAKARTA: TEMUAN DAN ANALISIS**

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang cukup pesat perkembangan penduduknya. Ia menandai perubahan dari masyarkat agraris yang berpusat di keraton, menjadi masyarakat urban dengan banyak pusat sosial-ekonomi baru. Banyaknya pendatang juga memunculkan anonimitas dalam kehidupan kota. Situasi ini menyebabkan solidaritas menipis. Pranata sosial yang menyangga kebutuhan komunal kehilangan relevansinya, digantikan oleh mereka yang menyediakan keahlian di bidang yang dibutuhkan. Tidak terkecuali merambah pada persoalan di sekitar perawatan jenazah.

Di Provinsi DI Yogyakarta angka kematian kasar pada 2007 mencapai 8,4 per 1.000 penduduk.[[10]](#footnote-9) Sementara itu, di Kota Yogyakarta jumlah penduduk yang meninggal pada 2012 mencapai 2.320, kemudian naik menjadi 2.376 (2013) dan pada 2014 angkanya turun menjadi 1.075 (tabel 2). Angka tersebut tentu masih berupa data kasar, mengingat tidak seluruh penduduk mau untuk mengurus akta kematian. Hal ini disebabkan karena akta kematian dianggap tidak terlalu berguna dan prosedur yang dinilai terlalu rumit.[[11]](#footnote-10)

Selain itu, sebagai kota yang memiliki tingkat harapan hidup yang paling tinggi se-Indonesia, mencapai 73 tahun (laki-laki) dan 74 tahun (perempuan), Kota Yogyakarta memiliki proporsi penduduk usia di atas 64 tahun yang relatif tinggi. Pada 2014, proporsi penduduk usia di atas 64 tahun mencapai 30.085 (7,37%).[[12]](#footnote-11) Angka tersebut diprediksi akan semakin tinggi, mengingat saat ini penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk yang berusia 20-24 tahun. Artinya 30-40 tahun lagi akan terjadi ledakan penduduk usia tua, yang tentunya membawa munculnya permasalahan baru, termasuk persoalan yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan jenazah.

Tabel 2. Banyaknya Kematian Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml |
| 1 | Danurejan |  66  |  59  |  125  |  48  |  52  |  100  |  51  |  39  |  90  |
| 2 | Mergangsan |  99  |  90  |  189  |  90  |  115  |  205  |  16  |  39  |  55  |
| 3 | Mantrijeron |  115  |  102  |  217  |  127  |  102  |  229  |  7  |  12  |  19  |
| 4 | Gondokusuman |  115  |  138  |  253  |  137  |  125  |  262  |  128  |  183  |  311  |
| 5 | Umbulharjo |  156  |  123  |  279  |  167  |  140  |  307  |  19  |  78  |  97  |
| 6 | Kotagede |  81  |  62  |  143  |  85  |  86  |  171  |  10  |  34  |  44  |
| 7 | Tegalrejo |  93  |  88  |  181  |  88  |  81  |  169  |  14  |  41  |  55  |
| 8 | Kraton |  60  |  69  |  129  |  71  |  61  |  132  |  8  |  21  |  29  |
| 9 | Gedongtengen |  72  |  58  |  130  |  88  |  76  |  164  |  93  |  54  |  147  |
| 10 | Gondomanan |  58  |  59  |  117  |  50  |  56  |  106  |  45  |  68  |  113  |
| 11 | Wirobrajan |  -  |  -  |  163  |  -  |  -  |  173  |  19  |  36  |  55  |
| 12 | Jetis |  62  |  87  |  149  |  82  |  87  |  169  |  -  |  -  |  18  |
| 13 | Ngampilan |  72  |  78  |  150  |  63  |  58  |  121  |  10  |  19  |  29  |
| 14 | Pakualaman |  47  |  48  |  95  |  35  |  33  |  68  |  4  |  9  |  13  |
| JUMLAH |  1.096  |  1.061  |  2.320  |  1.131  |  1.072  |  2.376  |  424  |  633  |  1.075  |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2015*, (Yogyakarta: BPS, 2015): 56.

Kehidupan kota yang mengatomisasi individu, menyebabkan lunturnya solidaritas. Pranata tradisional yang menyangga fungsi-fungsi sosial tergerus oleh meluasnya logika pertukaran pasar (marketisasi). Dalam logika pasar, pranata sosial berubah menjadi komoditas, tak ubahnya komoditas yang perjual-belikan dalam pasar. Ia mengalami komodifikasi. Demikian juga pranata sosial yang menyangga fungsi kesejahteraan pemakaman juga tidak lepas dari komodifikasi.

Masyarakat Kota Yogyakarta, sebagai masyarakat kota yang lain, mengalami permasalahan di seputar pelayanan jenazah, seperti semakin mahalnya biaya pengurusan kematian, ketersediaan lahan pemakaman dan semakin lunturnya rasa komunitas yang secara tradisional hadir sebagai penyangga pelayanan jenazah.

Berbeda dengan di wilayah pedesaaan, biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan jenazah sudah tegolong mahal. Berikut ini perhitungan kasar pengeluaran untuk pelayanan jenazah.

Tabel 3. Perhitungan Kasar Biaya Pelayanan Jenzah di Kota Yogyakarta[[13]](#footnote-12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pembiayaan | Rupiah |
| 1. | Biaya tanah makam (bila tidak di TPU) | Rp. 1.500.000,00 |
| 2. | Bedah Bumi (Penggali kubur) @ 2 orang | Rp 500.000,00 |
| 3. | Kendaraan dari rumah ke pemakaman (ambulance) | Rp 500.000,00 |
| 4. | Biaya lain-lain (konsumsi, tarub, dll) | Rp 1.000.000,00 |
| Total | Rp 3.500.000,00 |

Sumber: “Biaya Kematian Itu Berapa”, <http://jagongan.org/2014/10/27/biaya-kematian-itu-berapa/>, (diakses tanggal 15 Desember 2015).

Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, biaya di atas tergolong tinggi. Untuk meringankan biaya kelompok masyarakat tersebut, sebetulnya secara sosial komunitas masih berperan, yaitu misalnya dengan penyediaan perlengkapan seperti kursi, tenda, perlengkapan perawatan jenzah, sampai dengan penggali kubur. Biasanya hal itu dikelola oleh “*seksi lelayu*”, organisasi pelayanan jenazah yang berada di bawah koordinasi RT/RW. Adapun biaya untuk pembelian perlengkapan tersebut berasal dari iuran warga. Akan tetapi tidak setiap wilayah memiliki organisasi kematian tersebut.

Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyediakan jaminan kematian bagi pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Akan tetapi baru tersedia untuk 1.040 penerima saja dengan total dana yang dianggarkan sebanyak Rp 1,3 miliyar. Sampai triwulan ketiga 2015, total penerima mencapi 700 orang dengan rata-rata pemohon sebanayk 90 orang per bulannya. Jumlah yang dapat diperoleh oleh ahli waris dapat mencapai Rp 1,2 juta per orang.[[14]](#footnote-13) Dengan jumlah tersebut dan minimnya kuota penerima masih belum dapat dikatakan optimal.

# **VARIASI DAN SKEMA KESEJAHTERAAN PELAYANAN JENAZAH**

Berbicara variasi pelayanan jenazah di Yogyakarta, sebagaimana di tempat lain di Jawa, pada umumnya selalu melibatkan komunitas dan dibingkai dalam nilai religiusitas, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa variasi *institusi* pelayanan jenazah. Adapun variasi yang muncul, dalam pelayanan jenazah di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jenazah Komunitas

Pelayanan ini yang paling umum dilaksanakan. Pada umumnya jika ada yang meninggal dunia, pihak keluarga langsung memberikan informasi kepada pihak RT/RW (mengingat sudah tidak ada birokrasi *modin* dalam stuktur kelurahan di kota). RT/RW pada umumnya mereka memiliki organisasi kematian sendiri yang dinamai “*seksi lelayu*”. Seksi ini pada umumnya memiliki struktur yang tidak terlalu kaku, dan para pengurusnya dipilih semata karena mereka yang memiliki pengalaman dalam pengurusan jenazah. Seksi ini juga memili kas sendiri yang diambil dari iuran RT/RW dengan jumlah yang bervariasi. Perlengkapan kain kafan, minyak wangi, kursi, tenda umumnya telah tersedia, sehingga pihak keluarga tidak direpotkan dengan hal-hal semacam itu.Untuk pengurusan jenazah biasanya ada tokoh agama yang secara khusus membimbing keluarga dalam pengurusan jenazah.

1. Pelayanan Jenzah Kaum Agama

Pelayanan ini pada umumnya dilaksanakan pada wilayah yang lebih religius. Kelompok yang dominan juga dari komunitas pengajian ataupun jamaah masjid yang terorganisir, dengan semangat bahwa pengurusan jenazah juga harus sesuai dengan tuntunan agama mereka. Mereka biasanya sudah terlatih dalam mengurus jenazah dilengkapi dengan perlengkapan dalam perawatan jenazah. Biaya yang mereka miliki pada umumhya berasal dari kas pengajian/masjid. Organisasi seperti Muhammadiyah tingkat bawah (ranting) juga biasanya menyelenggarakan hal seperti itu. Akan tetapi biasanya pelayanan ini hanya terbatas pada anggota jamaahnya saja.

1. Pelayanan Jenzah Komersil

Di Yogyakarta telah muncul lembaga yang secara profesional mengurus jenazah, yaitu Yayasan Bunga Selasih dan Khusnul Khotimah RS PKU Muhammadiyah. Kedunya menyediakan secara profesional perawtan jenzah dari awal sampai akhir dengan biaya tertentu. Pada umumnya pengguna dari lembaga-lembaga ini adalah mereka yang berada di wilayah perumahan yang warganya belum memiliki lembaga organisasi kematian sendiri.

Dengan variasi-variasi tersebut dalam dijelaskan bahwa telah banyak variasi institusi yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat kota. Jika pada mulanya peran komunitas dan *modin* sangat besar, pada taraf tertentu menyusut atau malah digantikan dengan institusi baru, seperti layanan dari kelompok keagamaan dan lembaga profesional. Dampak dari variasi itu tentu menyangkut skema kesejahteraan dari masing-masing institusi tersebut. Adapun dapat dilihat beberapa variasi kesejahteraan pemakaman di Kota Yogyakarta.

1. Liberal

Skema penyediaan kesejahteraan pemakaman dengan menyerahkan sepenuhnya kepada profesional (*burial director*) yang seduai dengan bidangnya, mulai dari mengurus jenazah dalam hukum Islam (memandikan, mengkafani, mensholatkan, menguburkan) dengan harga tertentu. Skema ini disediakan oleh Yayasan Bunga Selasih (YBS) dan Khusnul Khotimah RS PKU Muhammadiyah. Model ini banyak terjadi di dalam komunitas dimana solidaritasnya rendah, seperti di perumahan-perumahan elit.

1. Korporatis-Konservatif

Skema penyediaan ini banyak melibatkan organisasi masyarakat keagamaan yang banyak tersebar di Yogyakarta, seperti kelompok pengajian, organisasi Muhammadiyah, ta’mir-ta’mir masjid dan pondok pesantren. Masyarakat yang dilayani biasanya disekitar pusat aktifitas organisasi-organisasi itu maupun mereka yang berafiliasi kepada organisasi itu.

1. Sosial-Demokrasi

Skema ini lazim ditemukan di kampung-kampung dimana pengurusan dilaksanakan oleh modin dusun/kelurahan setempat. Kewajiban modin salah satunya adalah mendatangi keluarga yang terkana musibah, baik diundang maupun tidak.

Tabel. Variasi dan Skema Kesejahteraan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspek | Liberal | Konservatif/Korporatis | Sosial-Demokrasi |
| InstitusiKomersial | YBS/PKU Muhammadiyah | - | - |
| InstitusiPemerintah | - | Kerukunan kematian di RT/RW | Santunan KematianPemkot |
| InstitusiRelijius | - | Muhammadiyah | Modin |

# **KESIMPULAN**

Keterkaitan isu pengorganisasian pelayanan kematian dan kesejahteraan kerap diabaikan. Padahal dengan pesatnya urbanisasi yang mengakibatkan komodifikasi dan lunturnya “rasa” sebagai sebuah komunitas, persoalan pengurusan jenazah tak lagi menjadi tanggung jawab institusi lama.

Masyarakat kota yang semakin terkomodifikasi menyebabkan hilangnya solidaritas. Maka, dalam penyelenggaraan pelayanan jenzah memunculkan variasi dan skema kesejahteraan atasnya. Adapun variasi yang muncul adalah komersial, pemerintah dan religius. Sedangka skema kesjahteraan yang muncul adalah model liberal, konservatif-korporatis dan sosial-demokrasi.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Castells, Manuel. *City, Class and Power*. Trans. Elizabeth Labas. New York: The Macmillan Press Ltd, 1978.

Badan Pusat Statistik. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Yogyakarta: BPS, 2015.

Geertz, Clifford. "Ritual and Social Change: A Javanese Example." *American Anthropologist* 59, no. 1 (1957), 32–54.

\_\_\_\_\_ . *Agama Jawa: Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa.* Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Komunitas Bambu, 2014.

Hakam, Saiful. *Kematian dalam Masyarakat Urban: Perawatan Jenazah oleh Yayasan Bunga Selasih Yogyakarta*. Tesis Master Universitas Gadjah Mada, 2011.

Irianto, Joko, Anwar Musadad dan Yuana Wiryawan. “Angka Kematian di Berbagai Propinsi di Indonesia (Riset Riskesdas 2007),” *Jurnal Ekologi Kesehatan* 8 no. 8 (2009), 1047-1056.

Valentine, Christine and Kate Woodthorpe. “From the Cradle to the Grave: Funeral Welfare from an International Perspective”, *Social Policy and Administration* 48 no. 5 (2014), 515–536.

Walter, T. "Three ways to arrange a funeral: Mortuary variation in the modern West." *Mortality* 10 no*.* 3 (2005): 37–41.

# **Sumber Lain :**

Antaranews, “Realisasi santunan kematian Yogyakarta capai 75 persen”, <http://www.antaranews.com/berita/520862/realisasi-santunan-kematian-yogyakarta-capai-75-persen>, (Diakses tanggl 21 Desember 2015).

“Biaya Kematian Itu Berapa”, <http://jagongan.org/2014/10/27/biaya-kematian-itu-berapa/>, (diakses tanggal 15 Desember 2015).

1. Clifford Geertz, “Ritual and Social Change: A Javanese Example,” *American Anthropologist* 59 no. 1 (1957): 32–54. [↑](#footnote-ref-0)
2. Tony Walter, “Three Ways to Arrange a Funeral: Mortuary Variation in the Modern West,” *Mortality* 10 no. 3 (2005): 173-192. [↑](#footnote-ref-1)
3. Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* terj. Aswab Mahasin cet.II (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), 3. [↑](#footnote-ref-2)
4. Clifford Geertz, “Ritual and Social Change: A Javanese Example,”: 40. [↑](#footnote-ref-3)
5. Saiful Hakam, “Kematian dalam Masyarakat Urban: Perawatan Jenazah oleh Yayasan Bunga Selasih Yogyakarta”, (Tesis Master, Universitas Gadjah Mada, 2011), 120. [↑](#footnote-ref-4)
6. Tony Walter, “Three Ways to Arrange a Funeral: Mortuary Variation in the Modern West,”: 187. [↑](#footnote-ref-5)
7. *Ibid., 182* [↑](#footnote-ref-6)
8. Manuel Castells, *City, Class and Power* trans. Elizabeth Labas (New York: The Macmillan Press Ltd, 1978), 16-17. [↑](#footnote-ref-7)
9. Christine Valentine and Kate Woodthorpe, “From the Cradle to the Grave: Funeral Welfare from an International Perspective”, *Social Policy and Administration* 48 no. 5 (2014), 515–536. [↑](#footnote-ref-8)
10. Joko Irianto, Anwar Musadad dan Yuana Wiryawan, “Angka Kematian di Berbagai Propinsi di Indonesia (Riset Riskesdas 2007),” *Jurnal Ekologi Kesehatan* 8 no. 8 (2009), 1054 [↑](#footnote-ref-9)
11. “Membuat Akta Kematian di Kota Jogja” <http://mutuku.blogdetik.com/2011/02/26/membuat-akta-kematian-di-kota-jogja> (Diakses tanggal 20 Desember 2015). [↑](#footnote-ref-10)
12. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2015*, (Yogyakarta: BPS, 2015): 56. [↑](#footnote-ref-11)
13. Biaya Kematian itu Berapa? <http://jagongan.org/2014/10/27/biaya-kematian-itu-berapa/>. Bahkan bagi warga pendatang harga satu lubang makam dapat mencapai Rp 5.000.000,00, bervariasi di masing-masing daerah. Tetapi tanah makam yang dikelola oleh pemerintah (TPU) hanya membayar retribusi Rp 25 ribu dan perpanjangan Rp 15 ribu. [↑](#footnote-ref-12)
14. Antaranews, “Realisasi santunan kematian Yogyakarta capai 75 persen”, <http://www.antaranews.com/berita/520862/realisasi-santunan-kematian-yogyakarta-capai-75-persen>, (Diakses tanggl 21 Desember 2015). [↑](#footnote-ref-13)